



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

Digitally signed by Nono  
Sudarno  
Date: 2021.06.08  
11:50:23 WIB  
Location: Tigaraksa

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nomor : 421.1 /Kep. 90 -DU. TK/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN SANTO PETRONELUS** Nomor: 032/YSP/II/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 26 Februari 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911208786.
  - b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 09 November 2020.
  - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/1954-Disdik tanggal 27 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN SANTO PETRONELUS**
  - b. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) BHINNEKA**
  - c. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0289011100594**
  - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **PETRUS SAGIA, IR**
  - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Perum Taman Walet Blok SG 2 No 2 Desa/Kel. Sindangsari Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Perum Taman Walet Blok SG 2 No 2 Desa/Kel Sindangsari Kec Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/Kep.169-Dis P dan K/2008 tanggal 08 April 2008
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG  
H. NONO SUDARNO, ST., M. SI.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR, yang diterbitkan dari Sistem SIPINTER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang ditampilkan dalam Dokumen ini dan yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.